KERJA SAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM BIDANG KEAMANAN MARITIM PADA TAHUN 2017-2019

Oleh: Nadya Putri Ramadhany

(nadyaputri2501@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliografi: 10 Jurnal, 20 Buku, 1 Paper, 10 Laporan Resmi, dan 49 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research examines the repositioning of Indonesia and Australia's maritime cooperation. Indonesia and Australia initiated their maritime cooperation in 2017 through the Joint Declaration on Maritime Cooperation, which was implemented with a plan of action in 2018. This cooperation was then incorporated into an extensive form of cooperation form through Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership in 2018, which was implemented with a plan of action in 2020. This research looks at the rationales behind the decision to rearrange the maritime cooperation into a more comprehensive agreement.

This research uses descriptive explanative method, extracting sources from books, journals, official documents and official pages from the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the Australian Department of Defense, and the Australian Department of Foreign Affairs and Trade which are used to analyze the maritime cooperation between Indonesia and Australia. The perspective used in this research is neoliberalism that serves as the basis for international cooperation theory. It is said that states are looking for absolute gains in when they are cooperating with other states.

This research indicates that the readjustment of a maritime cooperation between Indonesia and Australia has been influenced by the significance of Asia Pacific region in their foreign policies. Indonesia emphasizes its interest in the region under the World Maritime Axis (PMD) proclaimed during the Jokowi administration in 2014. Meanwhile, Australia outlines its Indo-Pacific Strategy (IPS) in the 2017 Australian Foreign Policy White Paper together with the 2016 Australian Defense White Paper.

Keywords: *International Cooperation, Maritime Security, World Maritime Axis, Indo-Pacific Strategy, Comprehensive Strategic Partnership Indonesia-Australia.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan kerja sama antara Indonesia dengan Australia dalam bidang maritim. Pada awalnya kerja sama antara kedua negara dipengaruhi oleh hubungan diplomatik yang naik-turun dikarenakan adanya rasa ketidakpercayaan di antara kedua negara. Australia menyebutkan dalam *Defence White Paper* tahun 1987 bahwa Australia melihat kedekatan geografis Indonesia sebagai sumber ancaman yang dapat datang “dari atau melalui” Indonesia, sehingga menimbulkan risiko bagi keamanan Australia.¹ Indonesia juga menaruh rasa tidak percaya pada Australia setelah masalah intervensi Australia pada kasus Timor-Timur dan kasus spionase terhadap Presiden SBY di tahun 2013.

Namun persepsi tentang pentingnya kawasan maritim mengharuskan kedua negara untuk menjalin kerja sama yang memfokuskan kepada visi maritim bersama. Pada awalnya, kerja sama maritim yang dijalin oleh Indonesia dan Australia hanya fokus membahas mengenai batas maritim dan pemanfaatan sumber daya. Baru pada tahun 2017 dijalin kerja sama maritim yang berfokus pada visi maritim bersama kedua negara. Kerja sama maritim ini dijalin melalui penandatanganan *Joint Declaration on Maritime Cooperation* pada tanggal 26 Februari 2017 di Sydney, Australia.

Kerja sama ini mengarah kepada prinsip-prinsip perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yaitu Kemitraan Komprehensif Indonesia-Australia (2005)

dan Perjanjian Lombok (2006). Dalam deklarasi bersama kerja sama ini terdapat lima belas poin tujuan bersama, yaitu:²

1. Bekerja sama untuk meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan sumber daya hayati laut;
2. Memperkuat kerja sama untuk memerangi praktek penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur, sebagaimana pula dengan kejahatan-kejahatan dalam bidang perikanan;
3. Mendorong pengembangan infrastruktur maritim yang maju dan konektivitas regional yang lebih luas untuk memfasilitasi perdagangan maritim, investasi, jasa dan pariwisata;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dengan menggerakkan lapangan pekerjaan baru melalui keterampilan dan pengembangan kapasitas;
5. Bekerja sama memperkuat arsitektur keamanan maritim di kawasan, termasuk berbagi informasi yang terkait dengan pemeliharaan keamanan maritim;
6. Bekerja sama, termasuk melalui mekanisme bilateral dan regional, untuk meningkatkan keselamatan maritim dan memperkuat komitmen dan upaya-upaya dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap lingkungan yang disebabkan oleh polusi di lingkungan laut;

¹ Evan A Laksamana, “Reinforcing Indonesia-Australia Defence Relations: The Case for Maritime Recalibration,” *Lowy Institute*, 2 Oktober, 2018, <https://www.lowyinstitute.org/publications/reinforcing-indonesia-australia-defence-relations-case-maritime-recalibration-1>, diakses pada 20 September 2020.

² Kementerian Luar Negeri RI, “Deklarasi Bersama Mengenai Kerja Sama Maritim Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia,” *Treaty kemlu*, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2017-0233.pdf>, diakses pada 19 September 2020.

7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pencairan dan penyelamatan, memperkuat kemampuan menghadapi kecelakaan udara dan laut di wilayah perairan, serta manajemen penanggulangan bencana;
8. Memajukan kondisi regulasi pelabuhan dan kapal yang aman;
9. Memperkuat hubungan antara Angkatan Laut, termasuk melalui kegiatan-kegiatan kerja sama;
10. Membangun kerja sama lebih erat antara institusi penegak hukum sipil kelautan melalui saling tukar informasi, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan kegiatan kerja sama bilateral;
11. Memerangi kejahatan lintas batas terorganisasi yang terjadi di laut melalui kerja sama yang lebih erat dan saling tukar informasi antara institusi penegak hukum dan keadilan;
12. Mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang penelitian kelautan dan kolaborasi dalam bidang ilmu kelautan;
13. Memperkuat kerja sama pendidikan dan penelitian di bidang keselamatan dan keamanan maritim, termasuk pengembangan *blue economy* yang berkelanjutan;
14. Memperkuat kerja sama dalam bidang warisan kebudayaan maritim, sesuai dengan kebijakan, hukum, dan peraturan nasional masing-masing; dan
15. Berkerja sama di forum-forum regional dan multilateral untuk memajukan kepentingan dan komitmen bersama di bidang maritim. Kerja sama ini kemudian diimplementasikan melalui *Plan of Action for the Implementation of the Joint*

Declaration on Maritime Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia yang disepakati pada tanggal 16 Maret 2018. *Plan of action* ini ditandatangani oleh wakil delegasi dari dua negara setelah melakukan pertemuan 2+2 Indonesia-Australia di *Commonwealth Parliamentary Offices* di Sydney, Australia. Indonesia diwakili oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya dan Australia diwakili oleh *Deputy Secretary Indo-Pasific Group* Kementerian Luar Negeri Australia Richard Maude.³

Plan of Action yang mencakup periode tahun 2018-2020 ini memiliki sembilan poin utama, yaitu:⁴

1. **Pengembangan Ekonomi, Konektivitas Maritim dan Blue Economy.** Indonesia dan Australia menyadari akan pentingnya perdagangan maritim dan perkembangan *blue economy*, serta pentingnya pariwisata maritim.
2. **Memperkuat Keamanan Maritim dan Memberantas Kejahatan Transnasional yang Terjadi di Laut.** Kedua negara menyadari untuk menanggapi secara efektif ancaman terhadap keamanan maritim termasuk

³ Aditya Mardiasuti, "Ini 9 Poin Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia," *Detik News*, 16 Maret, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia>, diakses pada 19 September 2020.

⁴ Kementerian Luar Negeri RI, "Deklarasi Bersama Mengenai Kerja Sama Maritim Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia," *Treaty kemlu*, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0238.pdf>, diakses pada 19 September 2020.

kejahatan transnasional yang dilakukan di laut, membutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang luas antara mitra internasional.

3. **Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan Kejahatan Lainnya di Sektor Perikanan.** Kedua negara menyadari bahwa *IUU Fishing* adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan penguatan lanjutan baik kerja sama secara bilateral, regional maupun internasional.
4. **Meningkatkan Keamanan Maritim, Mencegah serta Merespons Polusi Lingkungan Maritim.**
5. **Meningkatkan Koordinasi dan Manajemen Risiko Bencana Maritim.** Indonesia dan Australia berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi insiden penerbangan dan maritim di wilayah laut kedua negara, serta manajemen resiko bencana.
6. **Kolaborasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Sektor Marina.**
7. **Manajemen Berkelanjutan dalam Sumber Daya Maritim dan *Blue Carbon*.**
8. **Pengelolaan Warisan Budaya Maritim.**
9. **Memperkaya Kegiatan Dialog baik Skala Regional maupun Multilateral Forum.** Indonesia dan Australia akan bekerja sama termasuk dalam tingkat regional dan multilateral untuk mempromosikan komitmen dan kepentingan maritimnya.

Kerja sama maritim tahun 2017 ini kemudian ditegaskan kembali (reposisi) dalam kerja sama yang komprehensif melalui *Comprehensive Strategic Partnership Indonesia-Australia* (CSP)

yang disepakati pada tanggal 31 Agustus 2018. Kerja sama ini mengandung 5 poin utama yakni:⁵

- a. *Enhancing Economic and Development Partnership;*
- b. *Connecting People;*
- c. *Securing Our and the Region's Shared Interests;*
- d. *Maritime Cooperation; and*
- e. *Contributing to Indo-Pacific Stability and Prosperity.*

CSP ini kemudian diimplementasikan melalui *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* yang disepakati pada tanggal 10 Februari 2020 di Canberra, Australia. *Plan of action* tahun 2020 ini akan meneruskan pelaksanaan *plan of action* tahun 2018 serta mendukung kegiatan untuk mengimplementasikannya.⁶

Perubahan bentuk kerja sama pada tahun 2017 yang awalnya merupakan kerja sama maritim menjadi kerja sama yang komprehensif pada tahun 2018 menarik peneliti untuk mengkaji karena ada upaya penegasan kembali (reposisi) mengenai isu maritim dari Negara Indonesia dan Australia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat

⁵ "Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia," *DFAT*, 31 Agustus, 2018, diakses dari <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia>, pada 14 Oktober 2020.

⁶ DFAT, "Plan Of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020- 2024)," diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/plan-of-action-for-the-indonesia-australia-comprehensive-strategic-partnership-2020-2024.pdf>, pada 14 Oktober 2020.

dirumuskan suatu masalah yaitu: **“Mengapa Indonesia dan Australia melakukan reposisi terhadap kerja sama maritimnya?”**

KERANGKA TEORI

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah neoliberalisme dengan teori kerja sama internasional dan tingkat analisis negara-bangsa. Perspektif neoliberalisme merupakan turunan dari perspektif liberalism, yang berfokus pada hubungan setiap aktor yang lebih bebas untuk melakukan kerja sama. Kaum neoliberal berasumsi bahwa aktor-aktor internasional tinggal di dalam lingkungan yang anarki. Namun, berbeda dengan kaum neorealist yang pesimis melihat hubungan internasional, kaum neoliberal lebih optimis dan meyakini bahwa kerja sama dalam lingkungan yang anarki bukan tidak mungkin dilakukan.⁷

Neoliberalisme memiliki asumsi dasar diantaranya adalah negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional tetapi tidak sebagai aktor yang signifikan melainkan ada aktor lain yaitu *non state actors*, neoliberalisme berpandangan bahwa negara adalah aktor rasional, dalam lingkungan yang kompetitif neoliberalisme melihat negara harus mampu memaksimalkan kewenangan melalui kerja sama.⁸

Neoliberalisme mengutamakan adanya kerja sama antar aktor dalam hubungan internasional. Negara akan memberikan loyalitas dan sumber dayanya

kepada institusi jika institusi tersebut menghasilkan keuntungan mutualisme dan institusi mampu menyediakan negara untuk meningkatkan kepentingan nasional negara tersebut.⁹ Maka pandangan kaum neoliberal bahwa kerja sama antar aktor merupakan suatu hal yang menguntungkan sebagai solusi untuk meningkatkan *national interest* dan bertahan dalam situasi anarki.

Kerja sama internasional menurut pandangan neoliberalisme sangat mungkin terjadi karena negara-negara memikirkan perolehan absolut (*absolute gains*). Keyakinan negara-negara bahwa kerja sama tersebut pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak lah yang menyebabkan negara-negara tersebut mau ikut dalam kerja sama internasional.¹⁰

Kerja sama internasional dapat digolongkan menjadi tiga elemen penting yaitu:¹¹ Pertama, tindakan yang dilakukan oleh negara (dan aktor selain negara), diarahkan ke beberapa tujuan. Semua aktor tidak harus memiliki tujuan yang sama tetapi mereka sepihak dalam melakukan kerja sama.

Kedua, kerja sama dilakukan berdasarkan identifikasi dan komitmen untuk tujuan-tujuan yang akan dicapai, kerja sama yang dilakukan atas dasar permasalahan yang dihadapi masing-masing negara dengan komitmen

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Joseph M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist critique of the Newest Liberal Institutionalism,” dalam *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*. Yessi Olivia, Jurnal Transnasional 5, no. 1 (Juli 2013): 896-194.

¹¹ Helen Minler, *International Theories Of Cooperation Among Nations Strengths And Weaknesses* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 467-468.

⁷ Yessi Olivia, “Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional,” *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (Juli 2013): 896-914.

⁸ Steven L. Lamy, “Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neoliberalism,” dalam *The Globalization of World Politics*, 2nd edition. John Baylis & Steve Smith (eds.) (Oxford: Oxford University Press, 2001), 190.

bersama untuk mencapai kepentingan bersama.

Ketiga, yaitu keuntungan dari hasil kerja sama yang dilakukan. Kerja sama yang dilakukan menyiratkan keuntungan atau imbalan kepada para aktor. Keuntungan yang didapatkan tidak perlu sama besarnya atau baik untuk setiap negara tetapi kerja sama tersebut saling menguntungkan.

Sejalan dengan teori kerja sama internasional, penelitian ini melihat bahwa perolehan absolut (*absolute gains*) dari kerja sama maritim yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia didasarkan kepada kepercayaan bahwa keamanan dan kestabilan wilayah maritim kedua negara yang berdekatan akan menguntungkan kedua negara pada akhirnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi strategis Indonesia dan Australia yang terletak di Asia Pasifik tidak menjadikan mereka serta-merta melakukan kerja sama dalam bidang maritim. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia, dua negara terbesar di Indo-Pasifik yang mengawasi perairan regional yang strategis, seharusnya mendorong mereka ke dalam hubungan keamanan yang berpusat pada maritim. Mengingat kedua negara memiliki tantangan regional bersama di domain maritim, mulai dari pembajakan dan penangkapan ikan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan, hingga sengketa maritim seperti Laut Cina Selatan.¹² Namun, hubungan kerja sama yang telah terjalin diantara kedua negara sebelumnya tidak memfokuskan pada adanya persamaan kepentingan diantara mereka.

Di dalam *Defense White Paper* Australia, kepentingan bersama Indonesia-

¹² *Ibid.*

Australia tidak disebutkan hingga pada tahun 2013 dan domain maritim baru disebutkan pada tahun 2016. *Defence White Paper* Australia 2016 yang menyebutkan adanya kepentingan maritim bersama menunjukkan bahwa persamaan takdir geografis dapat menjadi basis untuk kerja sama yang lebih kuat.¹³ Didalamnya Australia secara eksplisit mengakui pentingnya domain maritim bersama.

*“Australia and Indonesia share maritime borders and enduring interests in the security and stability of South East Asia ... We have a mutual and abiding interest in the security and stability of the maritime domains that we share ...”*¹⁴

Sementara itu, *Defence White Paper* Indonesia juga tidak ada menyebutkan adanya persamaan kepentingan antara Indonesia-Australia, hingga pada tahun 2015 disebutkan bahwa walaupun hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Australia berjalan secara dinamis, namun hubungan ini memiliki signifikansi geopolitik dalam membentuk keamanan dan stabilitas regional.¹⁵ Meskipun definisi konkret dari kepentingan strategis bersama secara historis tidak disebutkan oleh kedua negara, namun telah muncul kesadaran bahwa visi maritim strategis bersama dapat mendukung kemitraan bilateral yang lebih kuat.

Hal ini kemudian terealisasi dengan dijalinnya kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia pada

¹³ Department of Defence, *2016 Defence White Paper* (Canberra: Department of Defence, 2013), 125, <http://www.defence.gov.au/whitepaper/docs/2016-defence-white-paper.pdf>, diakses pada 20 September 2020.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Laksamana, *Op.Cit*

tahun 2017, yang mana kerja sama ini diimplementasikan melalui *plan of action* pada tahun 2018. Kerja sama maritim ini kemudian diinkorporasikan ke dalam bentuk kerja sama yang komprehensif pada tahun 2018 melalui *Comprehensive Strategic Partnership Indonesia-Australia* pada tahun 2018 dan diimplementasikan melalui *plan of action* tahun 2020.

Indonesia dan Australia melakukan reposisi atau penegasan kembali terhadap kerja sama maritimnya karena penegasan kembali kerja sama maritim mendukung kebijakan luar negeri kedua negara yang menekankan pada strategisnya kawasan Asia Pasifik. Hal ini ditandai dengan Indonesia memiliki kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) dan Australia memiliki kebijakan *Indo-Pacific Strategy* (IPS).

A. Poros Maritim Dunia (PMD)

Pada tahun 2014, Presiden Indonesia, Joko Widodo pada periode pertama masa jabatannya, mengeluarkan suatu kebijakan bernama Poros Maritim Dunia (PMD). Kebijakan Poros Maritim Dunia ini resmi dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo melalui pidatonya di Naypyidaw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014 di Forum *East Asian Summit* ke-9.¹⁶ Poros maritim pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang muncul berangkat dari kondisi fisik Negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa laut. Kebijakan ini secara makro menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara mikro,

kebijakan ini memiliki empat poin utama, yaitu: mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), memberantas *illegal fishing*, ekspansi budidaya laut, dan mengembangkan padat karya di sektor maritim.¹⁷ Pada dasarnya kebijakan Poros Maritim Dunia merupakan upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menjadikan laut (maritim) sebagai titik sentral pertahanan dan ekonomi Negara Indonesia.

Konsepsi Poros Maritim Dunia ini kemudian terbagi ke dalam lima pilar, yaitu:¹⁸

- a. Pilar pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia;
- b. Pilar kedua, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan (ekonomi maritim);
- c. Pilar ketiga, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam (*deep sea seaport*), industri perkapalan, dan pariwisata maritim (konektivitas maritim);
- d. Pilar keempat, melaksanakan diplomasi maritim; dan
- e. Pilar kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim (keamanan maritim).

Kebijakan Poros Maritim ini memiliki konsekuensi berupa adanya tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut

¹⁶ Untung Suropati, Ian Montratama & Yohanes Sulaiman, *Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 128.

¹⁷ Bernhard Limbong, *Poros Maritim* (Jakarta:Margaretha Pustaka, 2015), 190.

¹⁸ Dewi Adithyanti Pramitha, "Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Australia dalam Hubungan Comprehensive Partnership di bidang keamanan maritim," *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* 3, no. 2 (Juni 2017): 17-32.

untuk mengontrol, mengawasi dan melindungi keamanan maritim guna mengurangi resiko dan melawan aktivitas ilegal dan ancaman dalam bidang maritim melalui penegakan hukum dan aturan yang sah demi melindungi warga dan kepentingan nasional. Sehingga syarat agar Indonesia dapat diakui sebagai Poros Maritim Dunia adalah mampu menyelenggarakan tata tertib di laut dan menciptakan keselamatan di laut serta menjamin keamanan maritim.¹⁹ Oleh karena itu, untuk menjadi negara poros maritim, Indonesia harus merespons dan turut mencari solusi atas berbagai permasalahan keamanan maritim kawasan.

Posisi Indonesia yang berada di persimpangan dua samudera (Hindia dan Pasifik), dimana sebagian dari wilayah perairannya yang luas menjadi jalur perlintasan maritim dunia, membuat Indonesia tidak dapat mengabaikan permasalahan keamanan maritim perairan yurisdiksinya.²⁰ Indonesia juga harus peduli dan menaruh perhatian terhadap permasalahan keamanan maritim kawasan (seperti kawasan Asia-pasifik), karena bila permasalahan keamanan maritim tersebut tidak tertangani dengan baik maka akan berdampak juga terhadap Indonesia.

Salah satu jalan bagi Indonesia untuk mencapai Poros Maritim Dunia adalah dengan menjalin kerja sama dengan negara lain dalam bidang maritim. Disinilah, Australia, negara yang berbagi lautan langsung dengan Indonesia serta berada dalam satu kawasan yang sama menjadi pasangan yang pas bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama maritim. Negara Indonesia dan Australia berbagi kepentingan bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional serta

menangani sengketa teritorial di wilayah tersebut, yang mana hal ini merupakan kondisi prasyarat yang harus Indonesia capai untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Kedua negara meskipun sering bertentangan namun berada di posisi saling tergantung satu sama lain, terutama dalam kerja sama maritim.

B. Indo-Pacific Strategy (IPS)

Negara Australia memiliki kebijakan luar negeri yang mengatur mengenai kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan ini juga biasa disebut *Indo-Pacific Strategy* (IPS). Konsep kebijakan ini diuraikan dalam *Foreign Policy White Paper* Australia 2017 bersama dengan *Defense White Paper* Australia 2016.²¹ *White Paper* 2017 menekankan pada pembangunan "*foundations for success*" yakni kemampuan domestik, diplomatik, pertahanan dan kapabilitas nasional yang kuat serta penyediaan bantuan di luar negeri untuk memastikan dunia yang stabil dan sejahtera. Hal ini memetakan kerangka kerja serta peluang untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan makmur di mana hak-hak semua negara dihormati.²²

Australia berupaya membentuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dari paksaan, berlimpah dengan peluang untuk semua dan berdasarkan aturan yang jelas dan adil. Berdasarkan nilai-

²¹ Thomas S. Wilkins, "Australia and the Indo-Pacific: A Region in Search of a Strategy, or a Strategy in Search of a Region?" *Ispionline*, <https://www.ispionline.it/it/publicazione/australia-and-indo-pacific-region-search-strategy-or-strategy-search-region-20694>, diakses pada 21 September 2020.

²² Jane M. Hardy, "Australia's Role in the Indo-Pacific," *Indo-Pacific Defense Forum*, 11 November, 2019, <https://ipdefenseforum.com/2019/11/australias-role-in-the-indo-pacific/>, diakses pada 21 September 2020.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Limbong, *Op.Cit*, hal. 94.

nilai ini, Australia meningkatkan aktivitas praktis dan jangka panjang dengan mitra regionalnya. Dalam buku putihnya, Australia memperjelas bahwa tidak ada tujuan kebijakan luar negeri jangka panjang yang lebih penting bagi Australia daripada memastikan kawasan tersebut berkembang secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, yang menjadi dasar kemakmuran kawasan dan hubungan kerja sama. Adapun visi Australia untuk kawasan Indo-Pasifik adalah:²³

- a. Sengketa diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum internasional dan tanpa ancaman atau penggunaan kekerasan atau paksaan;
- b. Pasar terbuka memfasilitasi arus barang, jasa, modal, dan gagasan;
- c. Integrasi ekonomi bersifat inklusif dan terbuka untuk semua ekonomi kawasan;
- d. Hak kebebasan navigasi dan penerbangan ditegakkan dan hak negara kecil dilindungi.

Australia melakukan beberapa langkah demi menunjang kebijakannya serta memajukan kepentingannya di Indo Pasifik, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara demokrasi utama Indo-pasifik (seperti Jepang, India, Indonesia, dan Republik Korea) serta bekerja sama dalam bidang maritim.²⁴ Alasan Australia menggaet

Indonesia sebagai mitra kerja samanya disebutkan dalam *foreign policy white paper* tahun 2017 bahwa posisi Indonesia yang strategis diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan Indonesia “pemimpin” di kawasannya termasuk ASEAN.²⁵

Kerja sama yang dijalin oleh Australia bersama Indonesia salah satunya adalah kerja sama maritim. Sebagai negara perdagangan utama yang dikelilingi oleh tiga samudra, keamanan dan kemakmuran Australia bergantung pada domain maritim yang terbuka, stabil, dan berbasis aturan. Dengan laut di kawasan ini yang semakin padat dan diperebutkan, Australia meningkatkan upaya untuk membangun kapasitas mitra regional untuk mengatasi tantangan seperti terorisme, penyelundupan manusia, keamanan laut, dan penangkapan ikan ilegal.

Di dalam *foreign policy white paper* tahun 2017 juga disebutkan bahwa Australia akan memperdalam kerja sama berdasarkan kepentingan maritim bersama termasuk kegiatan untuk melawan *IUU fishing*, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pencarian dan penyelamatan, serta meningkatkan hubungan antar angkatan laut.²⁶

Maka dari itu, Kebijakan luar

²³ “The Indo-Pacific: Australia’s Perspective,” Speech of Secretary of the Department of Foreign Affairs and Trade, Frances Adamson, *Department of Foreign Affairs and Trade*, diakses pada 21 September 2020, <https://www.dfat.gov.au/news/speeches/Pages/the-indo-pacific-australias-perspective>.

²⁴ “Promote a Stable and Prosperous Indo-Pacific,” *DFAT 2018-2019 Annual Report*, <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/Pages/department-of-foreign-affairs-and-trade-annual-report-2018-19.aspx/annual-report->

2018-19/home/section-2/promote-a-stable-and-prosperous-indo-pacific/index.html, diakses pada 21 September 2020.

²⁵ “2017 Foreign Policy White Paper,” Chapter Three: A Stable and Prosperous Indo-Pacific, *Australian Government*, diakses pada 21 September 2020, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/e/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/chapter-three-stable-and-prosperous-indo-pacific.html>.

²⁶ *Ibid.*

negeri yang dimiliki oleh Indonesia dan Australia inilah yang mempengaruhi kedua negara untuk memposisikan ulang kerja sama maritimnya ke dalam bentuk yang komprehensif dengan kepercayaan bahwa kerja sama ini nantinya akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kebijakan-kebijakan ini yang mengubah fokus kedua negara dalam menjalin kerja sama sehingga berfokus pada kepentingan bersama yang mereka miliki.

PENUTUP

Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan kerja sama antara Indonesia dengan Australia dalam bidang maritim. Pada awalnya kerja sama antara kedua negara dipengaruhi oleh hubungan diplomatik yang naik-turun dikarenakan adanya rasa ketidakpercayaan di antara kedua negara. Namun persepsi tentang pentingnya kawasan maritim mengharuskan kedua negara untuk menjalin kerja sama yang memfokuskan kepada visi maritim bersama. Pada awalnya di tahun 2017, Indonesia dan Australia menjalin kerja sama maritim dengan menandatangani deklarasi bersama pada tanggal 26 Februari dengan implementasi melalui *plan of action* tahun 2018. Namun, pada tahun 2018 terdapat kerja sama yang menginkorporasikan kerja sama pada tahun 2016 yakni *Comprehensive Strategic Partnership* (CSP) dan rencana aksinya di tahun 2020.

Sejalan dengan teori tentang kerja sama internasional, studi kasus ini melihat bahwa perolehan absolut (*absolute gains*) dari kerja sama maritim yang dilakukan oleh Indonesia-Australia didasarkan kepada kepercayaan bahwa keamanan dan kestabilan wilayah maritim kedua negara yang berdekatan akan menguntungkan kedua negara pada akhirnya. Faktor kebijakan luar negeri dari kedua negara

yang melihat pentingnya kawasan Asia-Pasifik mendorong terjadinya kerja sama tersebut.

Indonesia dan Australia memposisikan ulang kerja sama maritim mereka ke dalam perjanjian yang komprehensif disebabkan oleh adanya kebijakan luar negeri dari kedua negara yang menekankan pada strategisnya kawasan Asia Pasifik. Pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama tahun 2014, Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri yang disebut dengan Poros Maritim Dunia (PMD). Kebijakan ini merupakan upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menjadikan laut (maritim) sebagai titik sentral pertahanan dan ekonomi negara. Salah satu jalan bagi Indonesia untuk mencapai Poros Maritim Dunia adalah dengan menjalin kerja sama dengan negara lain dalam bidang maritim, yakni dengan Australia yang berbagi lautan dengan Indonesia serta berada dalam satu kawasan yang sama.

Kemudian, Australia memiliki kebijakan luar negeri yang mengatur mengenai kawasan Indo-Pasifik yang biasa disebut *Indo-Pacific Strategy* (IPS). Demi menunjang kebijakannya serta memajukan kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik, Australia menjalin kerja sama dengan negara-negara partner regionalnya yang mana salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan-kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia dan Australia inilah yang mengakibatkan kedua negara serius untuk melakukan kerja sama maritim.

DAFTAR PUSTAKA

Department of Defence. *2016 Defence White Paper* (Canberra: Department of Defence, 2013). Diakses dari

- <http://www.defence.gov.au/whitepaper/docs/2016-defence-white-paper.pdf>, pada 20 September 2020.
- DFAT. “*Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia*,” (diakses dari <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia>, pada 14 Oktober 2020).
- DFAT, “*Plan Of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020- 2024)*,” (diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/plan-of-action-for-the-indonesia-australia-comprehensive-strategic-partnership-2020-2024.pdf>, pada 14 Oktober 2020).
- DFAT. “*The Indo-Pacific: Australia’s Perspective*,” Speech of Secretary of the Department of Foreign Affairs and Trade, Frances Adamson, (diakses dari <https://www.dfat.gov.au/news/speeches/Pages/the-indo-pacific-australias-perspective>, pada 21 September 2020).
- DFAT. “*Promote a Stable and Prosperous Indo-Pacific*,” (diakses dari <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/Pages/department-of-foreign-affairs-and-trade-annual-report-2018-19.aspx/annual-report-2018-19/home/section-2/promote-a-stable-and-prosperous-indo-pacific/index.html>, pada 21 September 2020).
- DFAT. “*2017 Foreign Policy White Paper*,” Chapter Three: A Stable and Prosperous Indo-Pacific, (diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper/chapter-three-stable-and-prosperous-indo-pacific.html>, pada 21 September 2020).
- Grieco, Joseph M. “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist critique of the Newest Liberal Institutionalism,” dalam *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*. Yessi Olivia, Jurnal Transnasional 5, no. 1 (Juli 2013):896-194.
- Hardy, Jane M. “*Australia’s Role in the Indo-Pacific*,” (diakses dari <https://ipdefenseforum.com/2019/1/australias-role-in-the-indo-pacific/>, pada 21 September 2020).
- Kementerian Luar Negeri RI. “Deklarasi Bersama Mengenai Kerja Sama Maritim Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia,” *Treaty kemlu*, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2017-0233.pdf>, diakses pada 19 September 2020.
- Kementerian Luar Negeri RI. “Deklarasi Bersama Mengenai Kerja Sama Maritim Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia,” *Treaty kemlu*, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0238.pdf>, diakses pada 19 September 2020.
- Laksamana, Evan A. “*Reinforcing Indonesia-Australia Defence Relations: The Case for Maritime Recalibration*,” (diakses dari <https://www.lowyinstitute.org/publications/reinforcing-indonesia->

- australia-defence-relations-case-maritime-recalibration-1*, pada 20 September 2020).
- Lamy, Steven L. "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neoliberalism," dalam *The Globalization of World Politics*, 2nd edition. John Baylis & Steve Smith (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Limbong, Bernhard. *Poros Maritim*. Jakarta:Margaretha Pustaka. 2015.
- Mardiastuti, Aditya "Ini 9 Poin Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia," (diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia>, pada 19 September 2020).
- Minler, Helen. *International Theories Of Cooperation Among Nations Strengths And Weaknesses*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional," *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (Juli 2013): 896-914.
- Pramitha, Dewi Adithyanti. "Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Australia dalam Hubungan Comprehensive Partnership di bidang keamanan maritim," *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* 3, no. 2 (Juni 2017): 17-32.
- Suropati, Untung, Ian Montratama & Yohanes Sulaiman, *Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2016.
- Thomas S. Wilkins, "Australia and the Indo-Pacific: A Region in Search of a Strategy, or a Strategy in Search of a Region?" (diakses dari <https://www.ispionline.it/it/publicazione/australia-and-indo-pacific-region-search-strategy-or-strategy-search-region-20694>, pada 21 September 2020).